

**PENGAWASAN KENDARAAN BERMUATAN BARANG DI
SATUAN PELAYANANUPPKB (UNIT PELAKSANA
PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR) JEMBATAN
MERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

OLEH :

**RIZKA KHAIRANI LUBIS
168520051**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/4/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/4/23

**PENGAWASAN KENDARAAN BERMUATAN BARANG DI
SATUAN PELAYANAN UPPKB (UNIT PELAKSANA
PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR) JEMBATAN
MERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

OLEH :

**RIZKA KHAIRANI LUBIS
168520051**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengawasan Kendaraan Bermuatan Barang Di Satuan Pelayanan UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) Jembatan Merah Kabupaten Mandailing Natal

Nama Mahasiswa : Rizka Khairani Lubis

NPM : 168520051

Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing



Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP
Pembimbing I

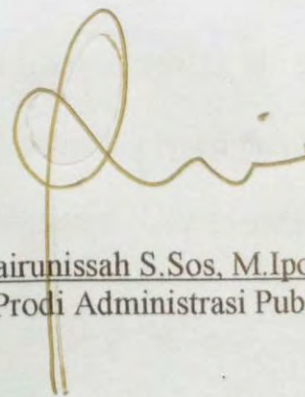


Nina Angelia S.Sos, M.Si
Pembimbing II

Mengetahui :



Dr. Effjati Juliana Hasibuan, M.Si
Dekan



Khairunissah S.Sos, M.Ipol
Ka. Prodi Administrasi Publik

Tanggal Lulus : 21 Februari 2023

RIWAYAT HIDUP

Rizka Khairani Lubis lahir di Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 16 September 1997. Anak Pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Muhammad Husein Lubis dan Ibu Samsinar Salohot Nasution. Pendidikan yang pernah ditempuh penulis adalah SD Negeri 147552 Pidoli Dolok Tahun 2004-2010. SMP Negeri 2 Panyabungan Tahun 2010-2013. SMK Negeri 1 Sinunukan Jurusan Teknik Komputer Dan Jaringan Tahun 2013-2016. Pada Tahun 2016 penulis melanjutkan Studi Strata Satu (S1) Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Medan Area.

Selama masa perkuliahan penulis cukup aktif dalam organisasi mahasiswa intra dan ekstra. Di intra kampus penulis pernah menjadi pengurus di PEMA FISIP UMA dan diamanahkan sebagai SEKRETARIS BIDANG PPSDM Periode 2018-2019. Di ekstra kampus penulis menjadi pengurus di Himpunan Mahasiswa Batang Natal (HIMABANA) dan diamanahkan sebagai SEKRETARIS BIDANG PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA pada tahun 2019. Dan penulis juga termasuk anggota dari organisasi KOMPAK MADINA (Koalisi Mahasiswa Pergerakan Kabupaten Mandailing Natal) pada tahun 2019-2020.

Penulis pernah melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Camat Sinunukan Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal dan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kantor Gubernur Sumatera Utara pada Biro Pemerintahan.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya Saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini Saya kutip dari berbagai sumber yang telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang Saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 2023



Rizka Khairani Lubis
168520051

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

) SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizka Khairani Lubis
NPM : 168520051
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah Saya yang berjudul: Pengawasan Kendaraan Bermuatan Barang Di Satuan Pelayanan UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) Jembatan Merah Kabupaten Mandailing Natal beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas skripsi Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Februaari 2023

Yang Menyatakan

(Rizka Khairani Lubis)



ABSTRAK

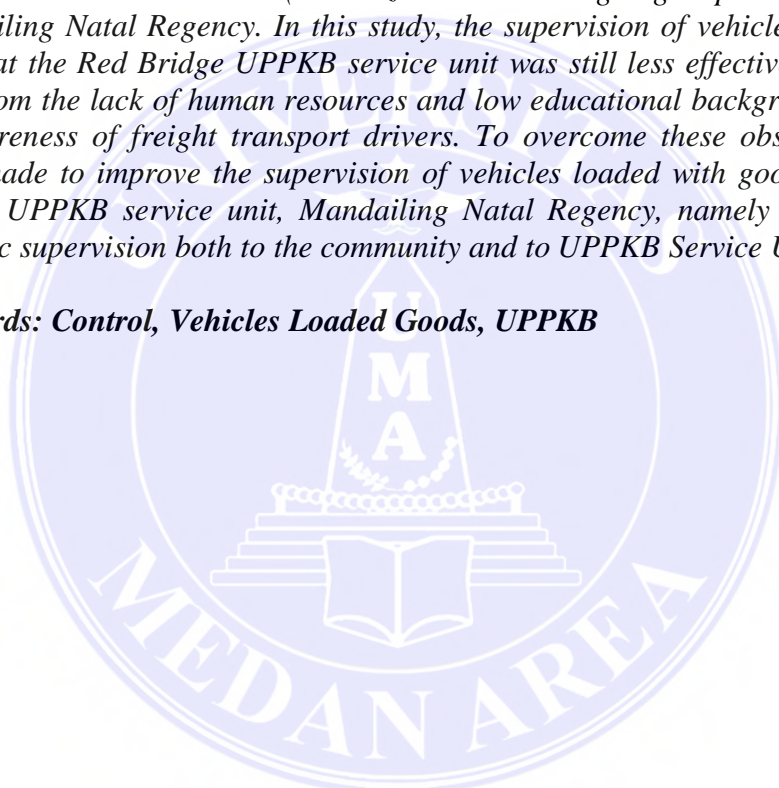
Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan Negara. Kendaraan pengangkut barang harus diawasi agar tidak melanggar ketentuan kelebihan muatan, yang dapat membahayakan keselamatan manusia, kerusakan kendaraan dan kerusakan jalan. Penelitian ini berbentuk deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu menggambarkan data yang di dapat dari lapangan yang menjelaskan dengan kata-kata. Penelitian ini berbentuk deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu menggambarkan data yang di dapat dari lapangan yang menjelaskan dengan kata-kata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan Kendaraan Bermuatan Barang di Satuan pelayanan UPPKB (Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor) Kabupaten Mandailing Natal. Dalam penelitian ini, pengawasan kendaraan bermuatan barang di satuan pelayanan UPPKB jembatan merah masih kurang efektif. Hal ini bisa dilihat dari masih kurangnya sumber daya manusia dan latar Pendidikan yang rendah, kurangnya kesadaran pengemudi angkutan barang. Untuk mengatasi hambatan tersebut maka dilakukan upaya untuk meningkatkan pengawasan kendaraan bermuatan barang di satuan pelayanan UPPKB Jembatan Merah Kabupaten Mandailing Natal yaitu dengan meningkatkan pengawasan secara berkala baik itu ke masyarakat maupun kepada petugas Satuan Pelayanan UPPKB.

Kata Kunci : Pengawasan, Kendaraan Bermuatan Barang, UPPKB

ABSTRACT

Transportation is a very important and strategic means in facilitating the wheels of the economy, strengthening unity and integrity and influencing all aspects of the life of the nation and state. Vehicles carrying goods must be supervised so as not to violate the provisions of overloading, which can endanger human safety, damage to vehicles and damage to roads. This research is in the form of descriptive with a qualitative approach, which describes the data obtained from the field explaining in words. This research is in the form of descriptive with a qualitative approach, which describes the data obtained from the field explaining in words. This study aims to determine the Supervision of Cargo Loaded Vehicles in the UPPKB Service Unit (Motorized Vehicle Weighing Implementation Unit) Mandailing Natal Regency. In this study, the supervision of vehicles loaded with goods at the Red Bridge UPPKB service unit was still less effective. This can be seen from the lack of human resources and low educational background, the lack of awareness of freight transport drivers. To overcome these obstacles, efforts were made to improve the supervision of vehicles loaded with goods in the Red Bridge UPPKB service unit, Mandailing Natal Regency, namely by increasing periodic supervision both to the community and to UPPKB Service Unit officers.

Keywords: *Control, Vehicles Loaded Goods, UPPKB*



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengawasan Kendaraan Bermuatan Barang Di Satuan Pelayanan UPPKB (Unit Pelaksana Pertimbangan Kendaraan Bermotor) Jembatan Merah Kabupaten Mandailing Natal” skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada Strata-1 di Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin berterima kasih kepada :

1. Allah SWT. Karena sudah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada saya sampai saya bisa menyelesaikan skripsi saya sampai selesai.
2. Kedua Orang Tua saya atas motivasi, nasehat, doa yang tiada henti serta dukungan baik materi maupun moril
3. Ibu Beby Masitho Batubara S.Sos, M.AP selaku dosen pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini
4. Ibu Nina Angelia S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing II penulis dan juga selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik yang telah meluangkan

waktu dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini

5. Ibu Riri Rezeki Hariani, S.Sos, M.AP selaku sekretaris penulis yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap dosen program studi Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Adik saya Rizki Khariyanda Lubis, Siti Atifatuz Zahra, dan Nurul Azifa
8. Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal dan pihak UPPKB Jembatan Merah, Purba Baru yang telah bersedia menjadi Informan dalam penelitian ini juga Staf yang membantu penulis dalam urusan data
9. Teman – teman yang selalu mensupport dan telah berjuang bersama hingga titik ini yaitu, Sri maharani, Aslihal Anwar, Vernalia, Anggi Dahliana Lubis, dan Alika Mutiara Zahra serta seluruh teman-teman prodi Administrasi Publik 16
10. Bapak / Ibu dan Staff dilingkungan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik UMA, khususnya Program Study Administrasi Publik yang telah banyak membantu penulis untuk dapat melaksanakan studi hingga pada penyelesaian tugas akhir

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan dilapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Medan, Desember 2023
Hormat penulis,

RIZKA KHAIRANI LUBIS
16.852.0051

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Pengawasan	7
2.1.1 Jenis-Jenis Pengawasan	12
2.1.2 Langkah-Langkah Pengawasan.....	14
2.1.3 Strategi Pengawasan.....	16
2.1.4 Indikator Pengawasan.....	17
2.2 Kendaraan Bermuatan	18
2.3 Penelitian Terdahulu	22
2.4 Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Lokasi Penelitian.....	29
3.3 Waktu Penelitian.....	29
3.4 Informan Penelitian.....	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data	31
3.5.1 Observasi.....	32
3.5.2 Wawancara	33
3.5.3 Dokumentasi	35
3.5.4 Triangulasi Data	36
3.6 Teknik Analisis Data.....	38

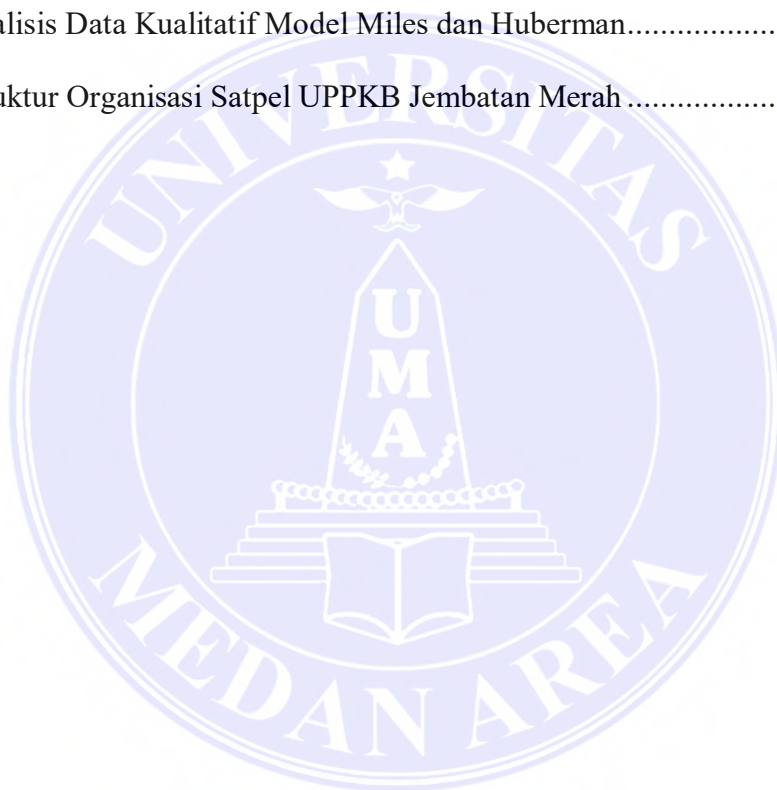
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1. Hasil Penelitian	41
4.1.1 Sejarah Kabupaten Mandailing Natal.....	41
4.1.2 Keadaan Demografis Kabupaten Mandailing Natal.....	43
4.1.3 Sejarah Satuan Pelayanan UPPKB Jembatan Merah	44
4.1.4 Struktur Organisasi Satuan Pelayanan UPPKB Jembatan Merah	45
4.1.5 Visi Dan Misi Satuan Pelayanan UPPKB Jembatan Merah	47
4.1.6 Tugas Pokok Perangkat Satuan Pelayanan UPPKB Jembatan Merah	47
4.2 Pembahasan Penelitian	56
4.2.1 Pengawasan Kendaraan Bermuatan di Satuan Pelayanan UPPKB Jembatan Merah Kabupaten Mandailing Natal	56
4.2.1.1 Rencana	66
4.2.1.2 Perintah Tujuan	70
4.2.1.3 Kebijakan Yang di Tentukan	73
4.2.2 Faktor Penghambat dalam Pengawasan Kendaraan Bermuatan di Satuan Pelayanan UPPKB Jembatan Kabupaten Mandailing Natal	76
4.2.2.1 Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan Latar Belakang Pendidikan yang Rendah.....	76
4.2.2.2 Kurangnya Kesadaran Pengemudi Angkutan Barang	77
4.2.2.3 Upaya Untuk Meningkatkan Pengawasan Kendaraan Bermuatan Barang Di Satuan Pelayanan UPPKB Jembatan Merah Kabupaten Mandailing Natal	79
BAB V PENUTUP	80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN	84
DATA INFORMAN	88
PEDOMAN WAWANCARA	90

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Rencana Waktu penelitian	30
Tabel 4.2 Nama Kecamatan Dan Jumlah Desa Di Kabupaten Mandailing Natal	41
Table 4.3 Laporan Pelaksanaan Operasional Satuan Pelayanan UPPKB Jembatan Merah Kabupaten Mandailing Natal	61

DAFTAR BAGAN

	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	27
3.2 Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman.....	38
4.3 Struktur Organisasi Satpel UPPKB Jembatan Merah	46



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan Negara. Pentingnya transportasi, baik darat, laut maupun udara, ini tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang. Sektor transportasi merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi penumpang dan barang yang berkembang dengan baik serta mempunyai peran didalam menunjang pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Dan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat, model transportasi yang aman nyaman sangat dibutuhkan. Salah satu pilihan masyarakat adalah transportasi darat.

Lalulintas angkutan jalan sangat diperlukan untuk distribusi barang dan manusia. Setiap harinya pertumbuhan kendaraan bermotor di jalan raya sangat besar. Oleh karena itu penyediaan moda transportasi masa yang aman nyaman sangat diperlukan karena untuk menekan pertumbuhan kendaraan. Distribusi barang terutama kebutuhan bahan makanan, kebutuhan hidup masyarakat, barang-barang penunjang kebutuhan ekonomi masyarakat setiap harinya terus dilakukan oleh masyarakat. Distribusi barang dilakukan antar Daerah, antar Pulau, bahkan antar Negara. Sebagian besar distribusi barang menggunakan moda transportasi darat, jenis angkutan barang ini sering di sebut truk.

Pertumbuhan sektor ini akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara langsung sehingga sarana transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis. Sektor transportasi dikatakan berhasil dapat dilihat dari kemampuannya dalam menunjang serta mendorong peningkatan ekonomi nasional, regional dan global. Dampak dari pergolakan ekonomi global yang semakin lama semakin deras yang diwarnai oleh liberalisasi perdagangan dan kesepakatan perdagangan regional serta makin canggihnya teknologi informasi dan telekomunikasi, menuntut kerja keras pemerintah dalam membangun sistem perangkutan yang memiliki keandalan, efisiensi dan daya saing yang tinggi.

Kondisi jalan yang baik dan kendaraan yang layak jalan merupakan kunci pokok kenyamanan dan keamanan dari lalu lintas angkutan jalan khususnya untuk angkutan barang. Keselamatan lalulintas angkutan jalan ini perlu diperhatikan dan perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah. Manajemen dan pengaturan transportasi darat ini dibawah kendali Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Darat. Penegak hukum terhadap peraturan lalulintas dibawah kendali Kepolisian Satuan lalulintas. Kerjasama dari para pengendali kebijakan lalulintas ini dapat menciptakan keselamatan bagi para pengguna jalan. Jalan merupakan fasilitas transportasi yang paling penting bagi masyarakat, karena sangat berpengaruh pada aktivitas sehari-hari masyarakat.

Jalan sebagai prasarana transportasi mampu memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mempergunakannya untuk mendukung hampir semua aktifitas sehari hari. Hal ini dipertegas dalam Undang – Undang jalan No.38 Tahun 2004 tentang jalan yang menyebutkan bahwa jalan merupakan prasaran transportasi yang memegang

peranan penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik dan pertahanan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Agar jalan tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan terlebih lagi dalam rangka keselamatan orang dan barang di jalan, maka perlu adanya pengaturan dan pengendalian penggunaannya, khususnya terhadap kendaraan muatan bertonase berat.

Kewajiban penggunaan jalan umum bagi kendaraan barang, meliputi melakukan penimbangan dan pemeriksaan beban muatan secara internal, memasang perangkat lunak yang memuat seluruh data kendaraan yang disediakan oleh pemerintah, memasang dan menutup terpal atau bahan lainnya pada bagian atas muatan, melakukan pencucian dan atau memastikan bahwa roda atau ban kendaraan terbebas dari kotoran tanah liat atau lumpur atau partikel lain, melakukan pembersihan jalan umum yang dilalui akibat kelalaian dari tata cara pengangkutan/pengemasan muatan, mematuhi ketentuan jumlah berat yang diizinkan sesuai dengan Muatan Sumbu Terbert (MST) spesifikasi kendaraan.

Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari kawasan industri seperti pertanian, perkebunan dan lainnya, hal ini yang menyebabkan banyaknya kendaraan besar seperti truk, tronton dan sebagainya melintas di jalan Provinsi untuk mengangkut barang - barang agar sampai ditempat tujuan. Dengan adanya jalan provinsi yang menghubungkan ibu kota Provinsi dengan ibu kota Kabupaten atau Kota,

pembangunan jalan ini telah memberikan sumbangan yang tinggi terhadap perkembangan ekonomi di Mandailing Natal.

Perkembangan ekonomi tersebut diikuti dengan pertumbuhan lalu lintas yang terjadi, baik dari segi jumlah kendaraan ataupun dari beban yang diangkut. *Overloading* merupakan suatu kondisi dimana kendaraan membawa muatan lebih dari batas muatan yang telah ditetapkan baik ketetapan dari kendaraan maupun jalan.

Dampak nyata yang ditimbulkan oleh muatan berlebih (*overloading*) atau kendaraan truk bertonase berat adalah kerusakan jalan sebelum periode/umur teknis rencana tercapai, dimana jalan merupakan sarana untuk publik jika kerusakan jalan memperpendek umur jalan, maka dibutuhkan dana untuk memperbaiki kembali jalan yang rusak.

Kerusakan jalan yang terjadi di permukaan jalan Kabupaten Mandailing Natal di wilayah Provinsi Sumatera Utara ini umumnya akibat kelebihan angkutan muatan barang hal tersebut dapat dilihat langsung dari pemberitaan media massa. Pelanggaran kelebihan muatan yang terjadi di jalan Kabupaten Mandailing Natal akibat tidak efektifnya penegakan hukum Dinas Satuan Pelayanan UPPKB (Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor) Kabupaten Mandailing Natal.

Perbaikan jalan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kerusakan jalan yang terjadi belum cukup mengatasi masalah karena kerusakan yang terjadi kebanyakan belum melewati umur rencana, perbaikan yang dilakukan adalah dengan cara menambal pada bagian yang rusak tetapi jalan yang sudah diperbaiki tidak bertahan lama bahkan kerusakan yang terjadi semakin parah.

Selain itu praktik-praktik yang membahayakan dan mahal seperti kelebihan muatan merupakan hal biasa yang terjadi, walaupun secara hukum diperlukan adanya jembatan timbang, para supir truk begitu saja melewati jembatan timbang dengan cara membayar setoran kepada petugas pada jembatan timbang tersebut.

Akibatnya terjadi kelebihan muatan di mana-mana yang sangat membahayakan keselamatan dan memperparah kerusakan jalan. Hal ini seharusnya jembatan timbang berperan penting dalam pengawasan kendaraan angkutan barang bukannya ikut serta membebaskan kendaraan – kendaraan yang bermuatan lebih lewat begitu saja.

Seperti yang tertera pada undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 169 ayat (1) dan (2) bahwa pengemudi dan atau perusahaan angkutan umum wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan. Untuk mengevaluasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang yaitu jembatan timbangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam karya ilmiah dengan judul “**Pengawasan Kendaraan Bermuatan Barang di Satuan Pelayanan UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) Jembatan Merah Kabupaten Mandailing Natal**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya ialah:

1. Bagaimana pengawasan kendaraan bermuatan barang di Satuan Pelayanan UPPKB (Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor) Jembatan Merah Kabupaten Mandailing Natal ?
2. Apa faktor penghambat dalam pengawasan kendaraan bermuatan barang di Satuan Pelayanan UPPKB (Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor) Jembatan Merah Kabupaten Mandailing Natal ?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Satuan Pelayanan UPPKB dalam meningkatkan pengawasan kendaraan bermuatan Kabupaten Mandailing Natal ?

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa :

1. Bagi instansi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi Satuan Pelayanan UPPKB (Unit Pelaksanaan Pertimbangan Kendaraan Bermotor) Jembatan Merah Kabupaten Mandailing Natal dalam mengawasi kendaraan bermuatan.
2. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan kemampuan untuk menganalisis permasalahan yang ada di suatu instansi/perusahaan.
3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan yang berkaitan tentang proses pengawasan kendaraan bermuatan di Satuan Pelayanan UPPKB (Unit Pelaksanaan Pertimbangan Kendaraan Bermotor) Jembatan Merah Kabupaten Mandailing Natal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pengawasan

Seorang pimpinan harus mempunyai beberapa cara untuk memastikan apakah setiap dari rencana yang telah dibuat serta disusun telah dilaksanakan dan dijalankan oleh bawahannya dengan baik atau sebaliknya fungsi ini merupakan fungsi pimpinan yang berhubungan dengan penyelamatan roda organisasi kantor kearah pencapaian tujuan atau suatu tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.

Pimpinan yang melaksanakan suatu pengawasan hendaklah mengerti apa yang sedang diawasinya dan kemudian jika terdapat suatu penyelewengan ataupun suatu kesalahan maka pimpinan tadi harus berusaha memperbaiki dengan cara sebaik mungkin, sehingga tujuan yang telah di tetapkan dapat dicapai dengan baik pula.

Memahamilebih lanjut mengenai pengawasan ini, penulis akan mengemukakan pendapat Handayani (2002:143) dalam bukunya:

“Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen“. Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah tujuan, atau kebijaksanaan yang ditentukan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap rencana (*planning*) yang telah diputuskan, perintah (*order*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*performance*), tujuan dan kebijaksanaan yang telah ditentukan.”

Menurut P.Siagian (2004:135), dikatakan bahwa : “Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjaga agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.”

Menurut Sarwoto (2003:92), “Pengawasan merupakan kegiatan manager yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan hasil yang dikehendaki”. Manullang berpendapat (2001:18), “Pengawasan adalah penilaian akan pekerjaan bawahan, baik yang sedang dikerjakan maupun yang sudah selesai dengan maksud mengadakan tindakan perbaikan bila perlu agar benar-benar dapat dihasilkan tujuan yang telah digariskan.”

Pengawasan itu dimaksud untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan, dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi, pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencapai kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaannya.

Defenisi-defenisi tersebut di atas penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pengawasan meliputi kegiatan-kegiatan melihat, memeriksa, dan menguji apakah pekerjaan itu terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kemudian dengan pengawasan ini akan dapat diketahui kelemahan-kelemahan dari pada pelaksanaan rencana tersebut sehingga tindakan perbaikan segera dilakukan demi tercapainya tujuan tersebut.

Jelaslah bahwa pekerjaan pengawasan itu merupakan fungsi pimpinan, semakin rendah tingkat pimpinan maka semakin rendah pula pekerjaan pegawai mengawasi, begitu pula sebaliknya jika semakin tinggi tingkat pimpinan maka semakin tinggi pula tugasnya untuk melaksanakan pengawasan.

Beberapa pendapat tersebut dapat dilihat adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Karenanya tidak ada pedoman untuk

melaksanakan itu. Sebaliknya rencana tanpa pengawasan kemungkinan timbul penyimpangan-penyimpangan maupun penyelewengan-penyelewengan yang tidak diharapkan tanpa adanya alat untuk mencegahnya yang pada akhirnya akan berakibat tidak tercapainya tujuan.

Sementara itu dapat dinyatakan bahwa :

1. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Setelah mengetahui tugas pengawasan dibawah ini penulis akan mengemukakan macam-macam pengawasan yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan dari dalam ;
2. Pengawasan dari luar ;
3. Pengawasan *preventip* ;
4. Pengawasan *repressip* .

Untuk lebih memperjelas macam-macam pengawasan disini akan diterangkan arti dari pengawasan tersebut :

- a. Pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dibentuk oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk di dalam organisasi itu sendiri.

- b. Pengawasan dari luar berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi itu.
- c. Pengawasan *preventif* ialah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan *preventif* ialah untuk mencegah terjadinya kekeliruan, kesalahan dalam pekerjaan.
- d. Pengawasan *refressip* ialah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan *refressip* ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai rencana yang ditetapkan.

Dalam melakukan pengawasan dipergunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Pengawasan langsung ialah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan *sistem inspektif*, *verifikasi* maupun dengan *system investigative*.
2. Pengawasan tidak langsung ialah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan – laporan yang masuk.
3. Pengawasan formal ialah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit/aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan daripada pimpinan organisasi itu.
4. Pengawasan informal ialah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan.
5. Pengawasan administratif ialah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian dan material.

6. Pengawasan teknis ialah pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat fisik, misalnya: pemeriksaan terhadap pembangunan gedung, pemeriksaan terhadap pembuatan kapal, pemeriksaan kesehatan rakyat di desa dan sebagainya.

Menurut Handyaningrat (2002:149) pengawasan juga mempunyai prinsip-prinsip yaitu :

1. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi.
2. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
3. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan, dan berorientasi terhadap tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
4. Pengawasan harus menjamin daya guna dan hasil guna pekerjaan.
5. Pengawasan harus berdasarkan atas standart yang objektif teliti dan tepat.
6. Pengawasan harus bersifat terus menerus.
7. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan perencanaan dan kebijakan waktu yang akan datang.

Untuk menciptakan kondisi pengawasan, maka syarat – syarat umum dapat dipergunakan sebagai berikut :

1. Menentukan standart pengawasan yang baik dan dapat dilaksanakan.
2. Menghindarkan adanya tekanan, paksaan, yang menyebabkan penyimpangan dari tujuan pengawasan itu sendiri.
3. Melakukan koreksi rencana yang dapat digunakan untuk mengadakan perbaikan serta penyempurnaan rencana yang akan datang.

Berdasarkan ketiga syarat tersebut, maka pengawasan yang dimiliki ketentuan standart tidak adanya penekanan dan senantiasa mengevaluasi rencananya. Kesemuanya akan dapat berjalan dengan baik. Positifnya suatu syarat pengawasan dapat disimak dari peranannya terhadap objek yang diawasi. Pengawasan yang intensif dapat menumbuhkan disiplin.

2.1.1. Jenis-jenis Pengawasan

Mengenai macam atau jenis pengawasan itu sangat banyak ragamnya, tergantung dari sudut mana pendekatan-pendekatan tersebut dilihat. Menurut M. Manullang ada 4 (empat) macam dasar penggolongan jenis-jenis pengawasan yaitu :

a. Waktu pengawasan

Waktu pengawasan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu :

1) Pengawasan *Preventive*

Yaitu suatu pengawasan sebelum objek yang diawasi terjadi, caranya dengan jalan membuat peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan dengan menggunakan blangko atau formulir-formulir tertentu.

2) Pengawasan *Repsesive* adalah pengawasan yang dilaksanakan setelah objek yang diawasi itu terjadi untuk mengetahui apakah penyimpangan-penyimpangan tugas tersebut ada.

b. Objek pengawasan

Objek pengawasan adalah pengawasan yang ditinjau dari segi pekerjaan yang dilakukan. Jenis pengawasan ini dapat dibedakan menurut bidangnya masing-masing yaitu :

- 1) Pengawasan dalam bidang produksi, adalah pengawasan yang dilakukan terhadap usaha-usaha untuk mencapai jumlah produktivitas yang telah ditetapkan perusahaan. Demikian juga kualitasnya harus diawasi secara efektif dan efisien.
- 2) Pengawasan dalam bidang keuangan, adalah pengawasan yang berhubungan dengan keadaan keuangan dalam perusahaan yang mencakup ongkos-ongkos produksi. Hal ini paling utama diperhatikan adalah mengenai keuangan perusahaan yakni kesanggupan pelaksanaan tepat pada waktunya dan tersedianya uang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan.
- 3) Pengawasan terhadap waktu, adalah pengawasan yang bertujuan agar suatu rencana dapat direalisasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- 4) Pengawasan terhadap manusia dan kegiatan yaitu pengawasan yang bertujuan untuk mengetahui apakah bawahan benar-benar telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan intruksi-intruksi yang telah digariskan oleh pimpinan.

c. Subjek pengawasan

Berdasarkan subjek pengawasan ini maka pengawasan dapat dibedakan atas 2 (dua) pengawasan yaitu :

1) Pengawasan intern

Umumnya pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang yang berwenang untuk mengadakan pengawasan dilingkungan perusahaan itu sendiri yang datang dari pimpinan terhadap bawahannya.

2) Pengawasan ekstern.

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang datang dari pihak luar perusahaan, pada umumnya pengawasan ini datang dari petugas- petugas pemerintah.

d. Cara pengumpulan fakta-fakta guna untuk pengawasan

Cara pengumpulan fakta-fakta yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data – data guna mengadakan pengawasan. Yang dalam hal ini dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam yaitu :

1) *Personal Observation*

2) *Oral Report*

Berdasarkan penggolongan di atas, masing-masing bagian sangat penting manfaatnya bagi setiap pimpinan untuk mengadakan pengawasan terhadap bawahannya. Dengan adanya *personal observation* atau pemeriksaan pribadi, maka seorang pimpinan dapat melihat sendiri apakah seluruh kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan semestinya atau malah sebaliknya.

Cara ini merupakan suatu tindakan yang baik, karena pimpinan dengan para bawahan dapat mengadakan kontak langsung, sehingga kesukaran-kesukaran di dalam pelaksanaan tugas dapat dilihat langsung oleh pimpinan.

2.1.2. Langkah-Langkah Pengawasan

Menurut Kadarman (2001:161) proses pengawasan yaitu :

- a. Menetapkan standar dan metode pengukuran kegiatan
- b. Mengukur kegiatan yang dilakukan
- c. Apakah kegiatan sesuai dengan standar
- d. Melakukan tindakan koreksi.

Sedangkan dalam pengawasan kendaraan bermuatan di Satuan Pelayanan UPPKB (Unit Pelaksanaan Pertimbangan Kendaraan Bermotor) Kabupaten Mandailing Natal melakukan berbagai langkah yaitu :

- a. Pemantauan dan evaluasi ketaatan persyaratan dan kewajiban izin.
- b. Menyediakan pos pengawasan, serta sarana pengawas lainnya.
- c. Menjalin keterbukaan informasi dan pengawasan berwawasan informasi teknologi ini secara berkesinambungan dan dapat diawasi oleh seluruh lapisan masyarakat melalui situs yang disiarkan secara waktu nyata dan terkini.

Pengawasan yang dilakukan Satuan Pelayanan UPPKB (Unit Pelaksanaan Pertimbangan Kendaraan Bermotor) Jembatan Merah Kabupaten Mandailing Natal diterapkan melalui sistem pengawasan sesuai yang didasarkan pada peraturan daerah Kabupaten Mandailing Natal tersebut dengan mekanisme atau standar operasional prosedur pengawasan meliputi :

1. Melakukan pemantauan (pos pengawasan) pada setiap pintu masuk Kota
2. Memeriksa pemegang izin/pemilik kendaraan bermuatan barang harus memenuhi kewajiban/ketaatan pengguna jalan umum untuk kendaraan muatan barang.
3. Melakukan penimbangan, pelanggaran muatan dikenakan sanksi berupa pembongkaran muatan. (Petugas alat penimbang yang dipasang secara tetap wajib mendata jenis barang yang diangkut, berat angkutandan asal tujuan).

Adapun Peraturan penggunaan jalan umum (Perda no 6 tahun 2001), yaitu :

1. Setiap kendaraan bermotor angkutan baik angkutan hasil tambang, hasil perkebunan, hasil kehutanan dan lain-lain diperbolehkan diangkut melalui

jalan umum dengan ketentuan tidak melebihi Muatan Sumbu Terberat (MST) jalan yang sudah ditetapkan melalui peraturan yang berlaku.

2. Apabila terdapat kendaraan bermotor angkutan yang bebannya melebihi Muatan Sumbu Terberat yang diizinkan, pihak pengangkut wajib membongkar kelebihan beban tersebut pada tempat yang telah ditentukan.
3. Pemerintah daerah wajib membuat tempat penampungan pembongkaran kelebihan muatan kendaraan angkutan disetiap jembatan timbang yang berada di wilayahnya.
4. Dalam hal pembongkaran kelebihan muatan kendaraan bermotor angkutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, maka akan dikenakan retribusi.

2.1.3. Strategi Pengawasan

Menurut Handyaningrat (2002:151) Strategi pengawasan adalah serangkaian upaya terencana yang dilakukan oleh pengawas dalam melaksanakan pengawasan. Strategi pengawasan mencakup tercapainya sasaran atau tujuan-tujuan dari suatu instansi yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam Strategi terkandung makna berdaya tepat atau berhasil guna untuk menyebutkan bahwa sesuatu itu telah berhasil dilaksanakan secara sempurna, secara tepat dan target telah tercapai. Selain itu terkandung makna efisiensi, yaitu berdaya guna untuk menunjukkan bila suatu tindakan atau usaha sudah efektif dan ekonomis, baru dikatakan efisien.

Sesuai dengan pengertian di atas maka strategi pengawasan merupakan suatu pencapaian hasil pekerjaan yang memiliki tujuan, sumber daya manusia pelaksana dan pengawas, jangka waktu, sumber dana dan ketentuan yang telah ditetapkan

sebelumnya, dalam artian bahwa hasil pekerjaan yang diperoleh sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Strategi berkaitan erat dalam kemampuan sumber dayamanusia memanfaatkan potensi yang ada. Strategi menunjukkan hasil pekerjaan yang diraih secara optimal dengan ciri yaitu adanya kesesuaian antara harapan dan kenyataan hasil kerja secara berkesinambungan.

Ditinjau dari strategi pelaksanaannya, pengawasan menurut Handyaningrat (2002:152), terbagi menjadi :

1. Pengawasan langsung ialah apabila aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem *inspektif*, *verifikatif*, maupun dengan sistem *investigatif*. Metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem pengawasan langsung atasan ini disebut *built in control*.
2. Pengawasan tidak langsung ialah apabila aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa kata-kata, deretan angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya atau anggaran yang telah direncanakan. Kelemahan pengawasan tidak langsung ini adalah tidak dapat segera diketahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan tersebut, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar.

2.1.4. Indikator Pengawasan

Pengawasan mempunyai indikator-indikator yang harus dicapai oleh suatu organisasi yaitu :

1. Penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan

Dalam pengawasan adalah menetapkan standar pelaksanaan, standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil.

2. Pengukuran kerja

Pelaksanaan kegiatan penetapan standar akan sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Ada beberapa cara untuk melakukan pengukuran kerja adalah :

- a. Pengamatan;
- b. Laporan-laporan hasil lisan atau tertulis;
- c. Metode-metode otomatis;
- d. Pengujian atau dengan pengambilan sample.

3. Penilaian kinerja

Penilaian kinerja tentunya tidak lepas dari motivasi karyawan sebagai penunjang kepuasan dalam melaksanakan tugas sehingga mampu menciptakan kinerja yang baik sehingga menguntungkan bagi instansi.

4. Tindakan koreksi

Pengembalian tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar yang dilakukan oleh pengawasan.

2.2 Kendaraan Bermuatan Barang

Dampak perkembangan sosial ekonomi sebagai akibat dari pembangunan telah membawa perubahan pada kondisi angkutan barang dengan meningkatnya angka ekspor impor barang maka dituntut adanya angkutan barang dengan skala dan kapasitas yang lebih besar. Angkutan barang adalah angkutan/kendaraan yang

memuat barang-barang yang tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi MST (Muatan Sumbu Terberat) yang dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan.

Muatan Sumbu Terberat (MST) dihasilkan oleh roda-roda kendaraan pada sumbu yang menekan jalan, muatan sumbu terberat dipakai sebagai dasar pengendalian dan pengawasan muatan kendaraan di jalan raya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia sendiri kapasitas yang mampu disediakan pembina jalan adalah $MST \leq 8 \text{ ton}$, $MST \leq 10 \text{ ton}$ dan muatan sumbu terberat dapat diartikan sebagai jumlah tekanan maksimum yang $MST > 10 \text{ ton}$.

Ketentuan tersebut menjadi dasar diwujudkan prasarana transportasi jalan yang aman. Dengan demikian, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan menimbulkan dampak inefisiensi berupa menurunnya kinerja pelayanan jalan, jalan yang rusak tidak dapat dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan yang diharapkan, karena permukaan jalan yang tidak rata, bahkan jalan tidak bisa dilewati sama sekali, karena kondisi jalan yang rusak parah.

Mengenai jumlah beban angkutan barang antar kota yang harus dipatuhi, berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan:

1. Angkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang.
2. Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, angkutan barang dengan kendaraan bermotor dapat menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor.

3. Persyaratan teknis untuk mobil penumpang dan mobil bus meliputi:
 - a. Tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
 - b. Barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan;
 - c. Jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.

Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai:

- a. Tata cara pemuatan
- b. Daya angkut
- c. Dimensi kendaraan, dan
- d. Kelas jalan yang dilalui.

Daya angkut tersebut ditetapkan berdasarkan jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan. Menurut Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, pengaturan mengenai kelas jalan, yaitu:

1. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton
2. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas

ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribudua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

3. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu limaratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
4. Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

Tata cara pengangkutan barang ini pun diatur di dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan, dimana dalam Pasal 7 - 10 Kepmenhub No. 69/1993 diatur mengenai tata cara Pengangkutan Barang Umum, yakni antara lain:

1. Menaikkan dan/atau menurunkan barang umum harus:
 - a. Dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas.
 - b. Pemuatan barang umum dalam ruangan kendaraan pengangkutnya harus ditutup dengan bahan yang tidak mudah rusak dan diikat dengan kuat.
2. Barang umum yang menonjol melampaui bagian terluar belakang mobil barang tidak boleh melebihi 2.000 milimeter. Bagian yang menonjol lebih dari 1.000 milimeter, harus diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya yang

ditempatkan pada ujung muatan. Apabila barang umum yang menonjol menghalangi lampu-lampu atau pemantul cahaya, maka pada ujung muatan tersebut ditambah lampu – lampudan pemantul cahaya.

3. Pemuatan barang umum dalam ruang muatan mobil barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara profesional pada sumbu-sumbu kendaraan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian relevan ini menjadi tolak ukur untuk peneliti dalam melakukan penelitian, berikut ini beberapa penelitian yang relevan.

1. Penelitian relevan yang peneliti ambil dikutip dari penelitian Gesaki Daitia Anugerah yang diambil dari Jurnal Administrasi Negara, mahasiswa Universitas Riau yang berjudul “Pengawasan Kendaraan Truk Bertonase Berat Di Jalan Umum Pekan Baru” tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian Pengawasan Kendaraan Truk Bertonase Berat Di Jalan Umum Pekan Baru dapat disimpulkan bahwa pengawasan kendaraan truk bertonase berat di jalan umum Pekan Baru dalam pengawasan belum optimal, dimana hasil tindakan penilaian belum mencapai hasil yang diharapkan, seperti masih banyak ditemukan adanya kendaraan truk bertonase berat (di atas 5 ton) yang melakukan pelanggaran rute jalan.
2. Penelitian relevan yang peneliti ambil dikutip dari penelitian T. Reza Zulkarnaen yang diambil dari Jurnal Administrasi Negara, mahasiswa Universitas Medan Area yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengawasan Dan Pengendalian Muatan Lebih” tahun 2017. Penelitian ini menggunakan

metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian Implementasi Kebijakan Pengawasan Dan Pengendalian Muatan Lebih dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dilaksanakan oleh UPPKB Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara khususnya pada objek penelitian yakni UPPKB Aek Batu dan UPPKB Gebang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian muatan,
- b. Dinas Perhubungan Sumatera Utara telah menetapkan organisasi dan tata kerja UPPKB.
- c. Kebijakan Menteri Perhubungan menetapkan bahwa pengawasandanpengendalian muatan lebih dilakukan dengan mempedomani Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SE. 01/ AJ. 307/ DRJD/ 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih.

Batas pelanggaran muatan yang dapat ditindak menurut surat edaran tersebut adalah 25 % sedangkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan menetapkan ketentuan batas muatan lebih yang diizinkan hanya 5 % dari daya angkut.

Kebijakan pengawasan dan pengendalian muatan lebih tersebut tidak diikuti dengan kesiapan sumber-sumber yang meliputi kelengkapan sarana dan prasarana UPPKB. Gebang diperoleh kesimpulan bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian muatan, Dinas Perhubungan

Sumatera Utara telah menetapkan organisasi dan tata kerja UPPKB (Unit Pelaksanaan Pertimbangan Kendaraan Bermotor).

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian saya, yakni pertama penelitian ini sama-sama penelitian kualitatif. Dengan mengangkat judul pembahasan pengawasan kendaraan bermuatan, menjelaskan bagaimana sistem kerja Dinas Perhubungan masing-masing penelitian, kegiatan setiap Instansi Dinas perhubungan Daerah yang terdapat di penelitian diatas, sistem pengawasan yang harus menyesuaikan SOP Dinas Perhubungan, sarana dan prasarana kendaraan bermuatan.

Sedangkan perbedaannya, untuk penelitian pertama yaitu lokasi kantor yang diteliti merupakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Penelitian pertama menggunakan teori pengawasan yang digunakan Brantas (2009) dengan 3 indikatornya yakni : Menetapkan standar yang digunakan dalam pengawasan, Menilai atau mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai, Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai rencana.

Perbedaan dari penelitian yang kedua adalah studi kasus Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Ruang lingkup pembahasannya lebih luas dikarenakan provinsi kalau dibandingkan dengan penelitian penulis yang hanya cakupan Kabupaten saja.

Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian kedua ini mengacu pada tolak ukur Edwar III tentang implementasi yakni ; sumber daya manusia yakni jumlah dan kompetensi petugas UPPKB, dan sumber daya sarana serta prasarana UPPKB, faktor struktur birokrasi, faktor komunikasi kebijakan dan faktor

disposisi atau kecenderungankecenderungan implementor dalam proses implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian muatan lebih.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah narasi atau uraian/pernyataan (*proporsi*) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. (Husaini Usman dan Purnomo Setiady,2017:68) dalam bukunya mereka menyimpulkan bahwa penjelasan peneliti terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan peneliti yang disusun berdasarkan kajian teoritis dan hasil penelitian yang relevan.

Pengawasan kendaraan bermuatan barangdi Satuan PelayananUPPKB (Unit Pelaksanaan Pertimbangan Kendaaran Bermotor) Jembatan Merah Kabupaten Mandailing Natal berfungsi untuk mengawasi kendaran angkutan barang yang melintasi jalur Lintas Sumatera.

Tingkat pengawasan kendaraan bermuatan barang di satuan pelayanan UPPKB (Unit Pelaksana Pertimbangan Kendaraan Bermotor) Jembatan Merah Kabupaten Mandailing Natal masih rendah. Adapun masalah yang menyebabkan rendahnya tingkat pengawasan kendaraan bermuatan barang di satuan pelayanan UPPKB Jembatan Merah adalah dikarenakan kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan latar belakang Pendidikan yang rendah, dan kurangnya kesadaran pengemudi angkutan barang tersebut.

Teori pengawasan menurut Handayaniingrat (2002:143) dalam bukunya “Pengantar Studi Ilmu Administrasi danManajemen“.Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan

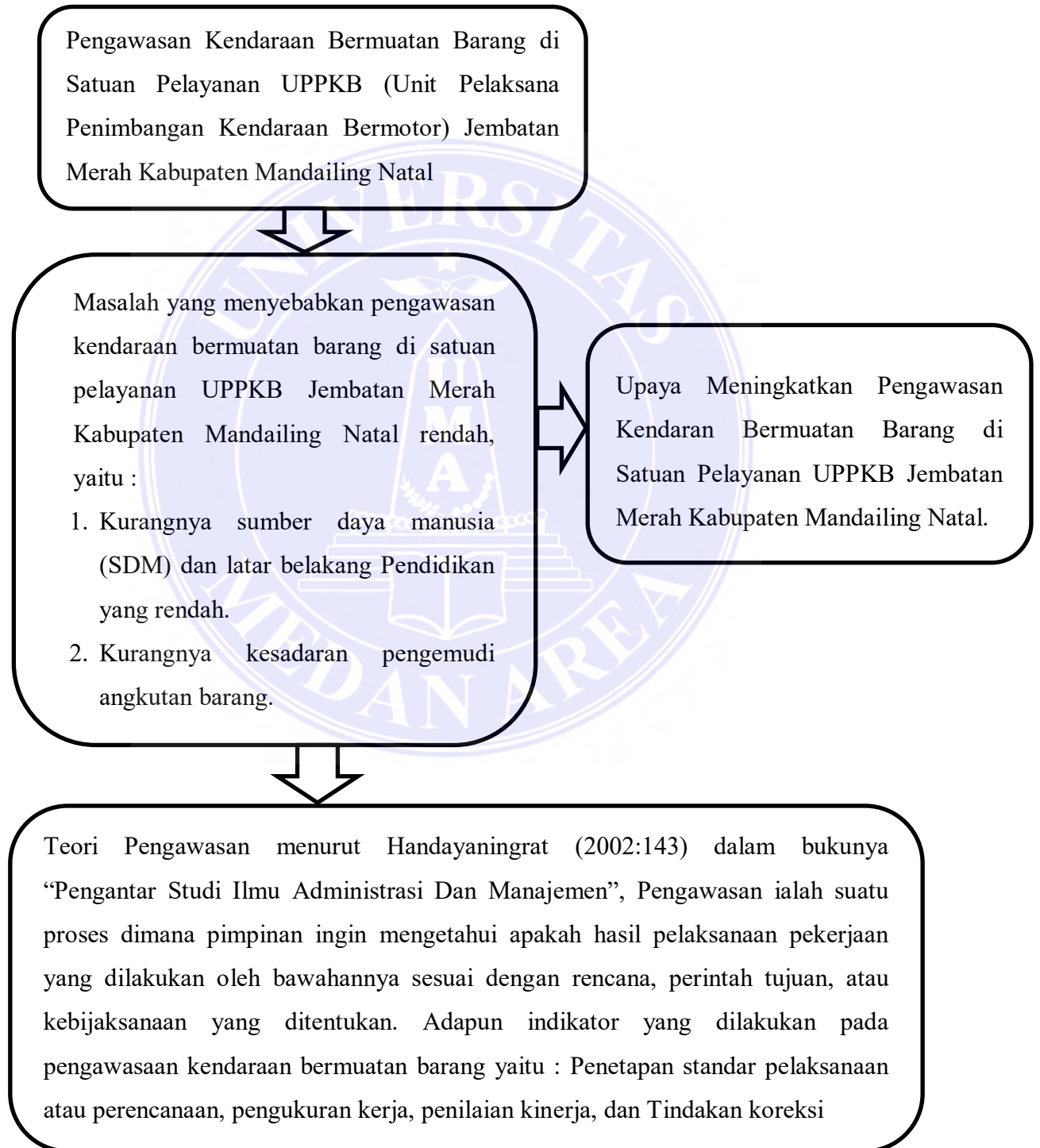
yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah tujuan, atau kebijaksanaan yang ditentukan.

Jelasnya pengawasan harus sesuai dengan indikator terhadap rencana (*planning*) yang telah diputuskan, perintah (*order*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*performance*), tujuan dan kebijaksanaan yang telah ditentukan. Dan harus sesuai dengan indikator pengawasan yang sudah di tentukan yaitu, penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan, pengukuran kerja, penilaian kinerja, dan Tindakan koreksi. Aktivitas pengangkutan barang yang melintasi Kabupaten Mandailing Natal harus mendapatkan pengawasan dari Satuan Pelayanan UPPKB (Unit Pelaksanaan Pertimbangan Kendaraan Bermotor), agar tidak terjadi pelanggaran muatan.

Pelaksanaan pengawasan angkutan barang di Satuan Pelayanan UPPKB (Unit Pelaksanaan Pertimbangan Kendaraan Bermotor) Jembatan Merah Kabupaten Mandailing Natal dapat dilaksanakan dengan baik ketika upaya yang di lakukan oleh satuan pelayanan UPPKB (Unit Pelaksana Pertimbangan Kendaraan Bermotor) Jembatan Merah mampu meningkatkan sumber daya manusia dan latar belakang pendidikan yang rendah, dan juga yang paling utama yaitu satuan pelaksana UPPKB harus mampu meningkatkan kesadaran pengemudi angkutan barang yang sering melakukan pelanggaran.

Sehingga masih dibutuhkan perhatian dari pihak UPPKB tersebut seperti mengadakan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat Kabupaten Mandailing Natal terutama kepada pengemudi angkutan barang, meningkatkan pembinaan secara berkala kepada petugas Satuan Pelaksana UPPKB (Unit Pelaksana Pertimbangan Kendaraan Bermotor) Jembatan Merah.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pemikiran peneliti mengenai Pengawasan Kendaraan Bermuatan Barang di Satuan Pelayanan UPPKB (Unit Pelaksanaan Pertimbangan Kendaraan Bermotor) Jembatan Merah Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut :



Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipilih oleh peneliti adalah penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Metode penelitian kualitatif ini dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi atau perhitungan lainnya.

Menurut Sugiono (2016:3) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.

Gunawan, 2005:81 menurut Sugiyono masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, *tentative*, dan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan. Dalam penelitian kualitatif akan terjadi 3 (tiga) kemungkinan terhadap masalah yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu :

1. Masalah yang dibawa oleh peneliti tetap, sejak awal sampai akhir penelitian sama, sehingga judul proposal dengan judul laporan penelitian sama.
2. Masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang, yang diperluas/diperdalam masalah yang telah disiapkan dan tidak terlalu banyak perubahan sehingga judul penelitian cukup disempurnakan.

3. Masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total sehingga harus mengganti masalah, sebab judul proposal dengan judul penelitian tidak sama sehingga judulnya diganti.

Berdasarkan defenisi-defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah – masalah manusia bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas informan penelitian.

Adapun alasan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif ini karena relevan dipakai untuk menggambarkan keadaan tentang pengawasan kendaraan bermuatan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada informan penelitian.

3.2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti, maka lokasi yang menjadi tempat peneliti penulis berada di Satuan Pelayanan UPPK Jembatan Merah, Purba baru, Lembah sorik marapi, Kabupaten Mandailing Natal.

3.3. Waktu penelitian

Penelitian tentang Pengawasan Kendaraan Bermuatan Barang di Satuan Penelitian UPPKB (Unit Pelaksanaan Pertimbangan Kendaraan Bermotor) Jembatan Merah Kabupaten Mandailing Natal” di mulai sejak judul disetujui oleh kedua pembimbing. Adapun tahap-tahapperincian kegiatan yang dilaksanakan akan peneliti uraikan dalam tabel 3.1 berikut ini :

NO	Kegiatan	Bulan Ke :														
		Nov 2019	Des 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mar 2020	Apr 2020	Mei 2020	Jun 2020	Jul 2020	Agst 2020	Sep 2020	Okt 2020	Nov 2020	Des 2020	Jan 2021
1	Tahap Persiapan penelitian															
	Pengajuan judul	■														
	Penyusunan Proposal		■													
	Seminar Proposal		■													
	Perbaiki Proposal			■	■	■										
2	Tahap Pelaksanaan Penelitian															
	Pengumpulan Data					■	■									
	Analisa Data					■	■	■								
	Perumusan hasil penelitian								■	■						
	Seminar Hasil									■	■					
3	Tahap Penyelesaian															
	Revisi Skripsi										■	■	■	■	■	■
	Sidang Meja Hijau															■

Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian

3.4. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi yang ada adalah kata informan yang nantinya akan diwawancarai. Oleh karena itu informan ditentukan dengan teknik *purposive* yaitu penentuan informan tidak berdasarkan pedoman atau berdasarkan perwakilan populasi, namun berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Dalam metode penelitian kualitatif informan memiliki peranan yang penting dalam pengambilan data atau informasi. Menurut Hendarsono (dalam Suyanto, 2005:171-172), informan penelitian ini meliputi 3 (tiga) macam yaitu :

1. Informan kunci (*key informant*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Koordinator Satuan Pelayanan UPPKB (Unit Pelaksanaan Pertimbangan Kendaraan Bermotor) Jembatan Merah Kabupaten Mandailing Natal yang akan menjadi informan kunci yaitu, Bapak Hasanul Arifin Nasution, S.Sos.
2. Informan Utama (*main informant*), yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah Bapak Ahmad Suharto Tanjung, SH selaku Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor di Satuan Pelayanan UPPKB (Unit Pelaksanaan Pertimbangan Kendaraan Bermotor) Jembatan Merah Kabupaten Mandailing Natal serta Petugasnya.
3. Informan tambahan (*additional informant*), yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan dalam penelitian ini adalah masyarakat pengguna jalan dan supir kendaraan bermuatan yang melewati jembatan timbang yaitu Bapak Dayat selaku informan tambahan I dan bapak Mhd. Husein selaku informan II.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk mempermudah dalam penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi data.

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan cara yang penting untuk mendapatkan informasi yang pasti tentang orang, karena apa yang dikatakan orang belum tentu sama dengan apa yang dikerjakan. Observasi merupakan proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang, atau proses kerja suatu produk di tempat pada saat dilakukan penelitian.

Menurut Sutrisno Hadi (dalam Sugioyono, 2015:214) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Menurut Kartono (dalam Gunawan, 2016:143) pengertian observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.

Menurut Sanafiah Faisal (dalam Sugiyono, 2014:377) Observasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

1. Observasi Partisipatif

Observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari – hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, penelitian ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Contohnya suatu lembaga pendidikan misalnya, penelitian dapat berperan sebagai guru, ia dapat mengamati bagaimana perilaku guru dan murid dalam pembelajaran,

bagaimana semangat belajar murid, bagaimana hubungan satu guru dengan guru lain.

2. Observasi Terus Terang dan Tersamar

Hal ini peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi.

3. Observasi Tidak Terstruktur

Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrument yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu – rambu pengamatan. Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak terstruktur, karena focus penelitian belum jelas. Focus observasi akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung. Tetapi kalau masalah penelitian sudah jelas seperti dalam penelitian kuantitatif, maka observasi dapat dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman observasi.

3.5.2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga

diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2015:231) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Ada tiga macam wawancara yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu :

a. Wawancara Terstruktur

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2015:232) Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan - pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data.

b. Wawancara Semiterstruktur

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2015:233) wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang menemukan permasalahan secara lebih

terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide – idenya.

c. Wawancara Tidak Terstruktur

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2015:233) wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap dalam pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan digunakan.

Wawancara tidak terstruktur atau terbuka, sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti.

Pada penelitian pendahuluan, peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang berbagai isi atau permasalahan yang ada pada objek, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variable apa yang harus diteliti.

3.5.3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritatera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain – lain.

G.J Renier (dalam Sugiyono 2015:240) menjelaskan istilah dokumen dalam tiga pengertian, pertama dalam arti luas, yaitu yang meliputi semua sumber, baik

itu sumber tertulis maupun sumber lisan. Kedua dalam arti sempit, yaitu yang meliputi semua sumber tertulis saja. Ketiga dalam arti spesifik, yaitu hanya yang meliputi surat-surat resmi dan surat-surat Negara.

Menurut Gottschalk, (dalam Gunawan, 2016:175) menyatakan bahwa dokumentasi dalam pengertiannya adalah setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.

Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data – data yang ada di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan dapat dipercaya apabila disertai dokumentasi.

3.5.4. Triangulasi Data

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data. Triangulasi digunakan sebagai proses pemantapan derajat kepercayaan dan konsistensi data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan.

Triangulasi menurut Mantja (dalam Gunawan, 2016:218) dapat juga digunakan untuk memantapkan konsistensi metode sidang, seperti pengamatan dan wawancara dengan beberapa informan. Triangulasi juga merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data. Triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran,

tetapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya.

Selanjutnya, menurut Denzim (dalam Gunawan, 2016:219) membedakan empat macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi peneliti, dan teoritik.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber untuk memperoleh data. Dalam triangulasi dengan sumber yang terpenting adalah mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan tersebut.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode adalah mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda (Rahadjo dalam Imam Gunawan, 2016:220).

3. Triangulasi Peneliti

Triangulasi Peneliti adalah menggunkan lebih dari satu peneliti dalam mengadakan observasi atau wawancara. Karena setiap penelitimemiliki gaya, sikap, dan persepsi yang berbeda dalam mengamati fenomena yang sama.

4. Triangulasi Teoritik

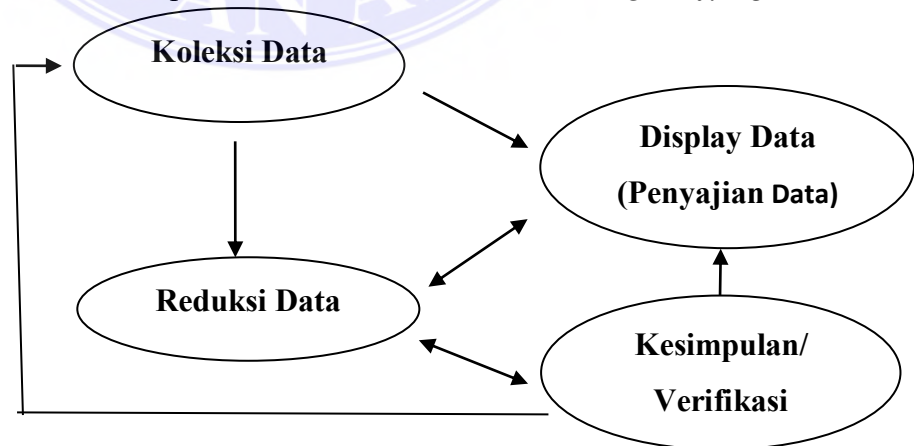
Triangulasi teoritik berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori. Triangulasi teoritik adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu dan dipadu.

Berdasarkan pengumpulan data ini, peneliti memakai triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber untuk memperoleh data. Selain menggunakan wawancara dan observasi peneliti juga menggunakan dokumen tertulis, catatan pribadi, catatan resmi, sehingga menghasilkan bukti atau data yang berbeda.

3.6. Teknik Analisis Data

Menurut Spradley (dalam Imam Gunawan, 2016:210) analisis data kualitatif adalah pengujian sistematis dari sesuatu. Artinya, semua analisis data kualitatif akan mencakup penelusuran data, melalui catatan-catatan (pengamatan lapangan) untuk menemukan pola-pola budaya yang dikaji oleh peneliti, Mantja (dalam Imam Gunawan, 2016:210).

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015:369), analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verifying*).



Sumber :Prof. Dr. Sugiyono, 2016

Bagan 3.2 Analisis Data Kualitatif Model Miles Dan Huberman

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2015:370).

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam reduksi data. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan wawasan yang tinggi.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dengan penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2015 :373).

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verifying*)

Langkah ketiga atau terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat

sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang kribel (Sugiyono, 2015:374).



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta data-data yang di dapat observasi maupun wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan kendaraan bermuatan barang di Satuan pelayanan UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) Jembatan Merah Kabupaten Mandailing Natal melakukan pengawasan dengan melalui proses 3 (tiga) indikator yaitu rencana, perintahtujuan dan kebijaksanaan yang ditentukan. Pengawasan juga dilakukan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung masih kurang efektif karena pada pelaksanaannya masih ada praktik pungutan liar di tahun 2020 dan membaik Kembali ke prosedur ditahun 2021, baik secara langsung maupun dengan menggunakan koin terhadap pengemudi angkutan barang yang mengalami kelebihan muatan.

Pengawasan secara langsung dilakukan dengan mengoperasikan jembatan timbang dan melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermuatan barang berupa pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan, pemeriksaan tanda bukti lulus uji, surat tanda bukti pendaftaran/surat tanda coba kendaraan bermotor dan surat ijin mengemudi. Pengawasan secara tidak langsung dilaksanakan dengan memberlakukan tertib operasional angkutan barang, yaitu pengoperasian mobil barang di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan, pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil

barang atau kendaraan khusus sesuai peruntukannya dan pengoperasian mobil barang di jalan wajib sesuai dengan kelas jalan dan jaringan lintas yang ditetapkan.

Faktor penghambat dalam pengawasan kendaraan bermuatan barang di Satuan pelayanan UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) Jembatan Merah Kabupaten Mandailing Natal adalah kurangnya sumber daya manusia dan latar Pendidikan yang rendah, kurangnya kesadaran pengemudi angkutan barang.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat, meningkatkan pembinaan secara berkala kepada petugas Satuan pelayanan UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor), dan penambahan alat timbang portable.

5.2. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan penulis adalah lebih mengoptimalkan pengawasan lagi dalam rangka mencegah terjadinya praktik-praktik penyelenggaraan kendaraan bermuatan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti, kelebihan muatan atau modifikasi kendaraan sehingga mampu menampung beban yang berat dan banyak sehingga merusak jalan. Penambahan jumlah sumber daya manusia pada administrasi dan sumber daya manusia pada bagian teknis agar tugas-tugas bisa dikerjakan secara efektif dan efisien. Menambah jumlah sumber daya manusia pada bagian administrasi dan sumber daya manusia pada bagian operasional agar pada jam sibuk tidak terdapat penumpukan. Dan peningkatan alat uji yang komputerisasi agar dapat mempercepat proses kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Gunawan, I (2016). Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik. Jakarta: Pt. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Dan Pengembangan. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Dan Pengembangan. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto. (2005). Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Handyaningrat. (2002). Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen. Jakarta : Gunung Agung.
- P.Siagian. (2004). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sarwoto. (2003). Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Surveyor Indonesia. (2020). Buku Panduan : Kerjasama Pengelolaan UPPKB Dengan Pihak Kedua. Indonesia.

Karya Ilmiah :

- Gesaki Daisia Anugerah. (2018). Pengawasan Kendaraan Truk Bertonase Berat Dijalan Umum Kota Pekanbaru. Universitas Riau. Jurnal Fisip, Volume 5, Nomor 1, April 2018.
- Irfan Saputra. (2017). Efektivitas Pengawasan Angkutan Barang (Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Provinsi Lampung). Universitas Lampung. Tesis
- Setiyo Daru Cahyono Dan Rosyidd Kholilur Rohman. (2012). Optimalisasi Kinerja Jembatan Timbang Untuk Menciptakan Angkutan Jalan Yang Berkeselamatan. Universitas Merdeka Madium. Jurnal Agri – Tek, Volume 13, Nomor 2, September 2012.
- Rencensus Dimas T, Ida Hayu. (2018). Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Kelayakan Jalan Kendaraan Bermotor di Kota Semarang. Universitas Diponegoro. Jurnal Fisip.

Peraturan Perundang-undangan :

Perda Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Peraturan Penggunaan Jalan Umum

Perda Nomor 74 Pasal 6 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan AngkutanBarang.

Keputusan Menteri Perhubungan Pasal 7-10 No.KM.69 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Di Jalan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 736/AJ. 108/DRJD/2007 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan.

Website :

<https://kbbi.web.id/>

<https://id.wikipedia.org/wiki>

<https://www.kemhan.go.id/badiklat/2016/04/11/perbedaan-kata-kebijakan-dan-kebijaksanaan-serta-mencolok-atau-menyolok.html>

<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82>

LAMPIRAN

A. Dokumentasi Tempat Penelitian



Gambar 1. Kantor Satuan Pelayanan UPPKB Jembatan Merah



Gambar 2. Kantor Satuan Pelayanan UPPKB Jembatan Merah



Gambar 3. Informan Kunci, Korsatpel UPPKB & Petugas UPPKBBapak HasanulArifin S.Sos dan Petugas UPPKB





Gambar 4. Informan Utama, Petugas Operasional yaitu Bapak Ahmad Suharto Tanjung, SH.



Gambar 5. Informan Tambahan I, Masyarakat Mandailing Natal yaitu Bapak Dayat



Gambar 6. Kendaraan Saat Melakukan Penimbangan



Gambar 7. Akibat Kelebihan Muatan

DATA INFORMAN

1. Informan Kunci

Nama : Hasanul Arifin Nasution S.Sos
Alamat : Panyabungan, Hutasiantar
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 49 Tahun
Pendidikan : S1
Jabatan : Koordinator Satuan Pelayanan UPPKB Jembatan Merah
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil dan Korsatpel UPPKB

2. Informan Utama

Nama : Ahmad Suharto Tanjung, SH
Alamat : Panyabungan, Sipolu-polu
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 30 Tahun
Pendidikan : S1
Jabatan : Ketua Petugas Operasional UPPKB
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil dan Ketua Petugas Operasional

3. Informan Tambahan I

Nama : Dayat
Alamat : Panyabungan, Kayu Laut
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 43 Tahun
Pendidikan : SLTA
Jabatan : Masyarakat Mandailing Natal

Pekerjaan : Wiraswasta

4. Informan Tambahan II

Nama : Muhammad Husein

Alamat : Panyabungan, Batang Natal, Sopotinjak

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 47 Tahun

Pendidikan : SLTA

Jabatan : Masyarakat Mandailing Natal dan Supir Truk

Pekerjaan : Wiraswasta



PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Rizka Khairani Lubis

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prodi : Administrasi Publik

Judul Skripsi: Pengawasan Kendaraan Bermuatan Barang di Satuan Pelayanan UPPKB (Unit Pelaksana Pertimbangan Kendaraan Bermotor) Jembatan Merah Kabupaten Mandailing Natal

Daftar Pertanyaan Informan Kunci dan Informan Utama : Koordinator Satuan Pelayanan UPPKB (Unit Pelaksana Pertimbangan Kendaraan Bermotor) dan Kepala Petugas Operasional Jembatan Timbang

1. Bagaimana pengawasan kendaraan bermuatan barang yang dilakukan Satuan Pelayanan UPPKB di Kabupaten Mandailing Natal ? dan pengawasan seperti apa?
2. Apakah ada Standar penetapan dalam melakukan pengawasan kendaraan bermuatan barang di satuan pelayanan UPPKB Jembatan Merah Kabupaten Mandailing Natal ?
3. Apakah ada pembinaan atau penyuluhan yang di berikan oleh Dinas UPPKB kepada pengendara atau masyarakat ?
4. Apakah ada indikator dalam pengawasan kendaraan bermuatan barang di satuan pelayanan UPPKB (Unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor) ?
5. Apa saja faktor penghambat dalam pengawasan kendaraan bermuatan barang di Kabupaten Mandailing Natal ?